



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI INTAKE DIII FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS**



SKRIPSI
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
(PP) NOMOR 12 TAHUN 2019 (PERIODE 2017-2020 DAN 2021-2024)**

Oleh:

Melani Dwi Setia

2310536006

Dosen Pembimbing :

Dra. Husna Roza, M.Com, Ak, CA

NIP. 196402051989012001

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi

PADANG

2025

	No Alumni Universitas :	Melani Dwi Setia	No Alumni Fakultas :
BIODATA a) Tempat / Tanggal Lahir: Painan/ 13 Mei 2002, b) Nama Orang Tua: Joko Setiabudi dan Reni Dahlia, c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis , d) Jurusan: S1 Akuntansi Intake DIII, e) No BP: 2310536006, f) Tanggal Lulus: 19 November 2025, g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan, h) IPK: 3,63, i) Lama Studi: 2 Tahun 3 Bulan, j) Alamat Orang Tua: Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan			
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Pasca Diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 (Periode 2017-2020 dan 2021-2024) Skripsi Oleh : Melani Dwi Setia Pembimbing : Dra. Husna Roza, M.Com, Ak, CA ABSTRACT <i>This study aims to analyze the financial performance of the Padang City Government before and after the implementation of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management. The analysis compares two periods, namely 2017-2020 as the period prior to the implementation of Government Regulation Number 12 of 2019 and 2021-2024 as the period after its implementation. Financial performance is assessed using five regional financial ratios, including the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, and Growth Ratio. This research employs secondary data derived from the Budget Realization Report of the Padang City Government obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of Padang City. The analytical methods used include financial ratio analysis and the paired sample t-test to examine differences in performance between the two periods. The results indicate variations in financial performance across the ratios during the observation periods. Overall, the financial performance of Padang City shows improvement in several indicators following the implementation Government Regulation Number 12 of 2019, particularly in revenue effectiveness and revenue growth. However, the level of fiscal independence remains low, reflecting a strong dependence on transfer revenues. These findings suggest that the implementation of Government Regulation Number 12 of 2019 has influenced the</i>			

pattern of regional financial management, although improvements have not occurred evenly across all financial aspects.

Keywords: Independence Ratio; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Activity Ratio; and Growth Ratio.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan dua periode, yaitu tahun 2017-2020 sebagai periode sebelum penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan tahun 2021-2024 sebagai setelah penerapannya. Penilaian kinerja keuangan menggunakan lima rasio keuangan daerah yang meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Padang yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan dan uji statistik *paired sample t-test* untuk melihat perbedaan kinerja antarperiode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi kinerja keuangan pada masing-masing rasio selama dua periode pengamatan. Secara umum, kinerja keuangan Kota Padang menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator setelah diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019, terutama pada efektifitas pendapatan dan pertumbuhan pendapatan daerah. Namun, tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori rendah dan menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap pendapatan transfer. Temuan mengindikasikan bahwa implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap pola pengelolaan keuangan daerah, meskipun peningkatan kinerja belum merata pada seluruh aspek keuangan.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.